

Peran Sistem E-Procurement Dalam Pengaruh Tata Kelola Pengadaan Terhadap Korupsi Di Sektor Publik Indonesia = The Role of E-Procurement System in The Effect of Procurement Governance on Corruption in the Indonesian Public Sector

Imelda Suardi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920577506&lokasi=lokal>

Abstrak

Penerapan tata kelola pengadaan untuk memerangi korupsi di sektor publik merupakan tantangan tersendiri. E-procurement di pengadaan barang dan jasa telah menjadi kewajiban di pemerintah Indonesia, tetapi implementasinya belum maksimal dan dapat memberikan peluang terjadinya korupsi yang disebabkan oleh tata kelola pengadaan yang lemah. Studi ini menguji bagaimana tata kelola yang didasarkan pada peraturan pemerintah dan rekomendasi global dapat mengurangi korupsi selama fase perencanaan, persiapan, dan implementasi pengadaan. Studi ini juga menguji pengaruh dan peran e-procurement dalam memperkuat pengaruh tata kelola pengadaan dalam mengurangi korupsi dari persepsi pengguna system. Studi ini menggunakan pendekatan mixed method dengan mendistribusikan kuesioner dan melakukan wawancara di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan penyedia barang jasa pemerintah. Studi ini mengumpulkan data primer dari 744 institusi dan melakukan analisa multikelompok terhadap pemerintah dan penyedia. Structural Equation Model (SEM Smartpls) digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis kualitatif sekuensial dengan NVivo digunakan untuk mengonfirmasi dan mempertajam hasil analisa kuantitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa tata kelola pengadaan secara signifikan berdampak negatif terhadap korupsi pengadaan. Hasil tersebut menyiratkan bahwa prinsip efisiensi, kapasitas, persaingan, serta pemantauan dan pengendalian berkorelasi kuat dengan tata kelola pengadaan. Selain itu, tahap persiapan pengadaan lebih terkait dengan korupsi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa e-procurement secara langsung tidak signifikan dalam mengurangi korupsi tetapi dapat memperkuat pengaruh tata kelola terhadap korupsi. Studi ini memberikan bukti bahwa implementasi e-procurement harus lebih maksimal digunakan di seluruh proses pengadaan bersama dengan tata kelola untuk mengurangi korupsi di sektor public Indonesia.

.....Implementation of procurement governance to combat corruption in the public sector is a challenge in itself. E-procurement in the procurement of goods and services has become an obligation in the Indonesian government, however, its implementation has not been maximized and can provide opportunities for corruption caused by weak procurement governance. This study examines how governance based on government regulations and global recommendations can reduce corruption during the planning, preparation, and implementation phases of procurement. This study also examines the influence and role of e-procurement in moderating the effect of procurement governance in reducing corruption from the perception of system users. This study uses a mixed-method approach by distributing questionnaires and conducting interviews in ministries, institutions, provincial governments, and government goods and services providers. This study collected primary data from 744 institutions and conducted a multigroup analysis of the government and providers. Structural Equation Model (SEM Smartpls) was used to test the hypothesis. Sequential qualitative analysis with NVivo was used to confirm and sharpen the results of the quantitative analysis. The results of the study prove that procurement governance has a significant negative impact on procurement corruption. These results imply that the principles of efficiency, capacity,

competition, and monitoring and control are strongly correlated with procurement governance. In addition, the procurement preparation stage is more related to corruption. The test results show that e-procurement is not directly significant in reducing corruption but can strengthen the influence of governance on corruption. This study provides evidence that e-procurement implementation should be more optimally used throughout the procurement process together with governance to reduce corruption in the Indonesian public sector.